

Peran Bentara Budaya dalam Menjaga Warisan Seni Tradisi di Tengah Arus Urbanisasi dan Globalisasi

Vincentius Tangguh A. Nugroho, Winarto, Endang Soelistiyowati, Carlos Iban

Afiliasi

Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya, Fak. Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada

Korespondensi

Winarto, Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya, Fak. Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Sekip Unit 1 Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta, Indonesia. 55281. Email: winarto21@ugm.ac.id

Intisari

Globalisasi dan urbanisasi telah menjadi tantangan bagi upaya pelestarian warisan budaya di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji peran Bentara Budaya Yogyakarta (BBY), sebuah lembaga kebudayaan di bawah Kompas Gramedia, dalam menjaga seni tradisi dan melibatkan masyarakat di tengah dinamika perkembangan kota. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara narasumber, penelitian ini menemukan bahwa BBY berperan sebagai ruang inklusif yang mendukung pelestarian seni tradisi yang sering terpinggirkan. Hal ini sejalan dengan konsep "people-centered museology" yang menjadikan museum atau lembaga budaya sebagai tempat aktif bagi komunitas untuk menjaga tradisi, bukan hanya penyimpanan artefak. BBY juga berupaya menyeimbangkan pelestarian budaya dengan perkembangan kota dan pariwisata. Keterlibatan masyarakat lokal ditekankan sebagai kunci pariwisata berkelanjutan. Secara keseluruhan, BBY memberikan akses dan ruang bagi seniman serta pengrajin tradisi, menciptakan dialog antara kreator dan apresiator. Keterlibatan masyarakat adalah elemen krusial dalam pelestarian budaya, sebagai upaya mempertahankan "patch" budaya lokal di tengah arus modernisasi global. Pelestarian warisan budaya memerlukan keseimbangan antara modernisasi, pelibatan masyarakat, dan pemahaman dinamika lokal untuk memastikan nilai budaya terus diwariskan.

Kata kunci: bentara budaya, pelestarian budaya, globalisasi

Informasi artikel:

Submisi: 4-7-2024 Revisi: 15-7-2025 | Diterima: 17-7-2025



Copyright © 2024 by the author(s). This article is published by Universitas Gadjah Mada, Indonesia under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. Anyone may reproduce, distribute, translate, and create derivative works of this article (for both commercial and noncommercial purposes), subject to full attribution to the original publication and author(s). The full terms of this license may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcod>

Pendahuluan

Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya dengan banyaknya pameran dan aktivitas seni. Aktivitas pameran ini didukung dengan banyaknya museum, galeri dan ruang seni. Salah satu lembaga penting di Yogyakarta adalah Bentara Budaya Yogyakarta. Bentara Budaya merupakan suatu lembaga kebudayaan yang dimiliki oleh PT Digital Inisiatif atau yang lebih dikenal dengan Kompas Gramedia, tepatnya dibawahi langsung oleh unit fungsional Corporate Communication. Bentara Budaya memiliki arti utusan budaya yang didirikan langsung oleh Jakob Oetama. Berdiri sejak 1982, Bentara Budaya selaku lembaga kebudayaan menyediakan tempat atas berbagai acara bertajuk seni dan budaya. Mulai dari pameran, lokakarya, pertunjukan seni, teater, musik, penayangan film, hingga diskusi dengan para seniman. Tak hanya sebagai sarana penyelenggaraan acara atau program seni, Bentara Budaya juga banyak mengoleksi benda seni seperti lukisan, keramik, benda kayu, serta wayang yang disimpan dan dikelola dengan baik (Bentara Budaya, 2024).

Bentara Budaya Yogyakarta mengaitkan dunia jurnalistik untuk mengangkat rasa perhatian pada manusia atau realitas sosial, yang membutuhkan banyak perhatian. Lembaga ini fokus di bidang seni, khususnya seni tradisi rakyat yang hampir tidak mempunyai kesempatan tampil. Walaupun telah banyak kajian yang dilakukan mengenai peran museum dan lembaga budaya dalam pertukaran informasi dan gagasan, belum banyak penelitian mengenai bagaimana suatu lembaga yang berfokus dalam giat ide dan semangat berkebudayaan dan yang memiliki patron sebuah organisasi usaha, terlibat dalam praktik pengelolaan budaya dalam masyarakat.

Budaya adalah asumsi, nilai, kepercayaan, praktik, dan institusi yang erat terkait dengan suatu masyarakat tertentu dan menjadi daya pembeda dari masyarakat tersebut. Kemampuan untuk memahami budaya masyarakat dan mengelola kebudayaan yang hidup dalam masyarakat adalah hal krusial karena pemahaman akan budaya memengaruhi harapan seseorang, perilaku, serta pemahaman dan penerapan norma dalam keluarga, masyarakat, dan di tempat kerja (Rietjens, 2019). Dalam situasi hidup komunal dengan anggota yang berasal dari berbagai latar belakang pemahaman budaya berbeda, kemampuan untuk secara efektif mengidentifikasi kesamaan dan melakukan adaptasi dengan perbedaan budaya akan mendorong berkembangnya lingkungan yang harmonis dan produktif. Hal yang tak kalah penting adalah upaya untuk menjembatani kesenjangan budaya, mempromosikan inklusivitas, dan membangun kecerdasan budaya. Kemampuan untuk mengelola budaya masyarakat secara efektif sangat penting untuk kesuksesan dalam manajemen lintas budaya (Sun, 2009).

Arus globalisasi yang ikut menyeret gelombang transformasi sosial bisa menjadi sebuah tantangan bagi upaya menjaga warisan budaya. Gempuran atas kelestarian budaya akan semakin terasa ketika kekayaan budaya yang dimaksud adalah warisan dari leluhur yang bersifat takbenda. Bahasa daerah, dialek, tarian dan musik tradisional, wayang, seni membatik, ritual, cerita rakyat, ilmu pengobatan tradisional, serta ilmu bertani adalah sedikit dari berbagai kekayaan budaya yang terancam oleh transformasi sosial. Salah satu wujud transformasi ini adalah perubahan demografi akibat urbanisasi yang berpotensi menumpul peluang transfer pengetahuan mengenai tradisi, praktik budaya, dan informasi lainnya yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun dalam masyarakat. Meskipun teknologi memudahkan transfer informasi, teknologi juga telah mengubah cara orang berkomunikasi

dan berinteraksi yang selanjutnya mempengaruhi bagaimana tradisi lisan diwariskan. Teknologi juga berpotensi meminggirkan praktik-praktik budaya tradisional karena mudahnya akses ke budaya massa yang lebih dominan lewat kehadiran media digital. Teks Konvensi UNESCO 2003 mengakui bahwa proses-proses globalisasi dan transformasi sosial telah menjadi ancaman serius yang bisa berujung pada gerusan, kerusakan, atau hilangnya warisan budaya takbenda (UNESCO, 2018).

Marilena Alivizatou dalam "*Intangible Heritage and the Museum*" menegaskan bahwa warisan budaya yang harus dilestarikan tidak hanya objek material saja, tetapi juga mencakup pengetahuan manusia, keyakinan, dan praktik yang mengalami transmisi dari generasi ke generasi. Namun, proses pelestarian budaya sering kali harus berhadapan dengan tuntutan modernisasi yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Alvarez et al. (2016) menulis:

"Heritage tourism may give rise to competition between traditional values and modern lifestyles. This is also one of the issues often raised in urban regeneration processes that are becoming increasingly a must for modern cities in a competitive globalized environment." (Alvarez et al., 2016, p. 4)

Kegiatan pariwisata warisan budaya berpotensi menimbulkan benturan antara nilai-nilai tradisional dengan gaya hidup modern. Konflik ini sering dipicu oleh kesenjangan antara pandangan dan praktik menjaga warisan masa lalu dan kebutuhan mengikuti perubahan gaya hidup. Sejalan dengan kuatnya arus globalisasi, kota perlu berkembang agar tetap relevan dan berdaya saing. Perkembangan kota dapat memicu pertentangan antara mempertahankan tradisi dan memperkenalkan perubahan. Salah satu tantangan utama yang adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pelestarian warisan budaya dan tuntutan ekonomi dari sektor pariwisata.

Denis Byrne (2009, hal 246) menyatakan kritiknya lewat istilah "*commodification of the past*" dimana ada kecenderungan mengubah obyek atau kisah masa lalu menjadi barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Artinya, warisan budaya dapat berisiko menjadi komoditas yang terlepas dari konteks sosial dan komunitasnya. Komodifikasi dapat menyebabkan hilangnya kedalaman makna simbolis dari praktik budaya yang dijadikan bahan pertunjukkan komersial. Walaupun komersialisasi bukan sesuatu yang sepenuhnya ditolak, Alivizatou (2016, hal. 186) mengingatkan bahwa komersialisasi tidak seharusnya merusak keaslian atau menghilangkan kendali komunitas atas ekspresi budaya mereka sendiri.

Upaya konservasi untuk mempertahankan keaslian budaya tak bisa lepas dari konteks konservasi perkotaan. Bailey et al. (2020) menulis bahwa "... *the shift in thinking about the urban environment, away from purely physical tissue and urban fabric towards the cultural landscape model, is among the most important in moving towards sustainable urban conservation ...*" (Bailey et al., 2020, p. xvi).

Bailey menyakini bahwa konservasi perkotaan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan bukan hanya aspek fisik saja, tetapi juga aspek budaya. Lanskap budaya adalah hasil interaksi antara unsur alam dan aktivitas manusia, yang bersama-sama membentuk identitas suatu lokasi atau kota. Lanskap budaya mencakup nilai-nilai sosial, historis, dan emosional yang melekat pada tempat tersebut.

Di tengah gempuran komersialisasi, ada peran penting yang bisa dijalankan museum dan institusi budaya sebagai penjaga keaslian warisan budaya. Peran sebagai perawat warisan budaya menjadi krusial terutama di kota-kota yang menjadi titik pertemuan arus globalisasi. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai perkembangan kota dan warisan budaya lebih banyak berfokus pada peran konservasi budaya (Mahira et al. 2023) dan pengelolaan warisan budaya (Udeaja et al., 2020 dan Shehata 2022). Namun, belum banyak penelitian yang berfokus pada aktor konservasi yang berada di wilayah urban dengan dinamika berbeda-beda. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap peran Bentara Budaya Yogyakarta dalam pelestarian warisan budaya ditengah arus perkembangan kota.
2. Mengungkap bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pelestarian budaya.

Metode

Untuk mendapatkan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai topik yang diriset, narasumber untuk penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling method. Narasumber penelitian, yaitu dua staf Bentara Budaya Yogyakarta, secara khusus dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat khas. Narasumber memiliki pengalaman lebih dari 2 dekade mengelola kegiatan kesenian di Bentara Budaya, bekerja erat dengan seniman lokal, mengenal dekat berbagai seniman lokal, dan memiliki pengetahuan mengenai berbagai lembaga Bentara Budaya di kota-kota lainnya. Meskipun korporasi besar nasional yang menaungi Bentara Budaya adalah organisasi bisnis, Bentara Budaya bukanlah sebuah lembaga yang berorientasi pada keuntungan bisnis. Posisi unik para staf Bentara Budaya sebagai karyawan korporasi nasional tersebut menyajikan tambahan kedalaman informasi untuk penelitian ini. Penelitian kualitatif ini berlangsung dari bulan Maret sampai dengan November 2024 di Yogyakarta, kota dimana narasumber berkantor.

Data untuk penelitian didapat dari wawancara dengan narasumber. Kegiatan wawancara ini dilakukan lewat berbagai jalur yaitu lewat pertemuan langsung di kantor narasumber, lewat aplikasi WhatsApp, dan aplikasi Google Doc. Lewat aplikasi yang tersebut terakhir, disediakan beberapa pertanyaan untuk dijawab secara tertulis oleh narasumber. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Pertama, data mentah yang berupa hasil wawancara yang panjang diringkas dan pokok-pokok penting yang ditemukan diberi kode. Selanjutnya, berbagai kode yang mengacu pada ide yang mirip kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kategori dan tema. Kemudian, data yang telah tereduksi tersebut direpresentasikan dalam bentuk tabel sehingga bisa ditarik kesimpulan dan dilakukan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan olah data dan analisis terhadap isi wawancara dengan narasumber menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, empat pokok penting mengemuka sebagai tema utama. Wawancara mengenai tantangan dan strategi pelestarian budaya dalam konteks perkotaan di Indonesia tersebut mengungkap tema utama sebagai berikut: (1) Keberagaman Budaya Kota, (2) Keterlibatan Publik dan Peran Institusi, (3) Pariwisata Budaya yang Berkelanjutan, dan (4) Komitmen Kebijakan dan Politik. Keempat tema ini menggambarkan tantangan dalam mempertahankan identitas budaya di tengah arus modernisasi dan globalisasi perkotaan. Tabel di bawah ini menyajikan keempat tema tersebut.

Empat Tema hasil wawancara dan implikasinya			
Tema	Deskripsi	Sampel Kutipan	Implikasi
Keberagaman Budaya Kota	Tiap kota memiliki kebutuhan pelestarian budaya yang berbeda	<i>"Coraknya relatif berbeda... mengikuti perkembangan masyarakat setempat."</i>	Strategi pelestarian harus berbasis lokalitas
Keterlibatan Publik dan Peran Institusi	Kelembagaan budaya menjembatani seniman dan masyarakat	<i>"Titik pertemuan bagi kreator dan apresiator."</i>	Akses dan partisipasi publik penting untuk keberlanjutan
Pariwisata Budaya yang Berkelanjutan	Pariwisata bisa memperkuat atau merusak budaya tergantung nilainya	<i>"... jika dikelola secara value, bukan mengejar mass-tourism."</i>	Perlu model pariwisata yang etis dan edukatif
Komitmen Kebijakan dan Politik	Keberlanjutan pelestarian budaya memerlukan dukungan kebijakan	<i>"Political will dari penentu kebijakan..."</i>	Keberhasilan bergantung pada kebijakan multiperspektif yang berpihak pada pelestarian budaya

Tema 1: Keberagaman Budaya Kota

Pelestarian budaya di perkotaan di Indonesia dipengaruhi oleh keragaman latar belakang kota sebagai akibat dari karakteristik kota, sejarah, dan komposisi masyarakat. Bentara Budaya beradaptasi dengan keberagaman tersebut dan menyesuaikan dengan budaya kota. Di Yogyakarta, lembaga ini memberikan ruang untuk seniman tradisional yang terpinggirkan. Di Jakarta, lembaga tersebut mendukung ekspresi kontemporer kota besar. Di Bali, lembaga yang sama memediasi antara arus pariwisata global dan seni lokal. Sementara, Bentara Budaya di Solo berfokus pada tradisi klasik Jawa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber, *"Setiap kota memiliki masalah pelestarian budayanya sendiri... BBY memberikan ruang... bagi seniman pengrajin, seniman tradisi, maupun yang dianggap pinggiran."* Keragaman budaya kota ini mendorong Bentara Budaya untuk menerapkan strategi budaya yang berbeda-beda dengan memperhatikan konteks fisik, sosial, dan budaya kota.

Bailey et al. (2020) mengatakan bahwa kota adalah hasil kombinasi antara berbagai bentuk aspek ciptaan manusia dan konteks sosial dan budaya yang muncul dari interaksi dan kegiatan manusia. Maka, pelestarian budaya tidak dapat dipisahkan dari konteks perkotaan karena setiap kota adalah hasil dari interaksi antara pencapaian manusia dan konteks sosial budaya yang mendasarinya. Lebih lanjut Bailey et al. mengatakan bahwa setiap generasi memiliki peran dalam perubahan yang terjadi di dalam perkotaan: berkontribusi pada pengembangan dan peningkatan kualitas lingkungan kota atau sebaliknya, menyebabkan kerusakan dan penurunan nilai lingkungan kota tersebut. Dengan demikian, setiap generasi memberikan kontribusi, baik melalui peningkatan atau penghilangan elemen budaya.

Pelestarian warisan budaya di kota-kota besar sering kali berhadapan dengan tantangan perubahan generasi yang pesat. Dalam konteks ini, pelestarian harus dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan perkembangan infrastruktur kota, sambil tetap menjaga integritas nilai-nilai tradisional yang menjadi warisan budaya. Bentara Budaya berperan dalam memberikan akses kepada publik dan seniman lokal untuk menjaga tradisi yang sering kali terlupakan dalam arus globalisasi dan urbanisasi. Narasumber mencantohkan upaya-upaya pelestarian yang telah dilakukan oleh Bentara Budaya di Yogyakarta, Jakarta,

Solo, dan Bali (di Gianyar) yang tetap mempertimbangkan kekhasan budaya dan dinamika kota masing-masing.

Pelestarian budaya di Jakarta, menurut narasumber, menghadapi tantangan urbanisasi. Menurutnya, kesenian tradisional di Jakarta berhadapan langsung dengan kesenian urban modern, dan program-program pelestarian harus mengakomodir kesenian urban ala Jakarta. Kisah Jakarta bukanlah kisah yang unik, karena penyesuaian dengan perkembangan masyarakat kota yang cepat juga merupakan tantangan pelestarian budaya di kota global lainnya. Di Singapura, salah satu tantangan utama dalam pelestarian warisan budaya adalah kecenderungan komodifikasi dan dominasi agenda politik atau ekonomi. Sebuah penelitian mengenai pelestarian praktik pemakaman di Singapura menuliskan: "*Singapore has, for decades, sacrificed a significant part of its cultural heritage, the one associated with funerary legacies and death spaces*" (Ocón, 2021, hal. 94).

Salah satu harga dari pembangunan kota modern adalah banyak lokasi atau tradisi terkait pemakaman atau ritual kematian yang terabaikan dan hilang tergulung pembangunan dan modernisasi. Pengembangan ruang kota yang terbatas sering kali menyebabkan hilangnya ruang untuk keperluan tradisional seperti pemakaman. Modernisasi dan tantangan urban kontemporer sering kali mengorbankan aspek-aspek warisan budaya, sebuah fenomena yang teramat di kota-kota yang menjadi zona kontak arus globalisasi. Narasumber berharap bahwa kebijakan-kebijakan kota tidak meninggalkan akar sosial-budaya kota tersebut. Karena, imbuhan, kecondongan berat sebelah pada aspek pembangunan fisik dan pengembangan ekonomi semata akan beresiko pada "*kehilangan warisan-warisan kebudayaan yang berharga*".

Pernyataan narasumber mencerminkan tantangan serupa di Indonesia, di mana pelestarian budaya tradisional dihadapkan dengan modernisasi dan pengaruh globalisasi. Untuk itu, kata narasumber, Bentara Budaya juga membuka pintu untuk pengrajin dan seniman tradisi – mereka yang kesulitan mendapatkan akses fasilitas dan menempati lokasi marginal dan jauh dari popularitas. Bentara Budaya memberikan ruang bagi seniman tradisional dan masyarakat lokal untuk mengekspresikan diri mereka. Hal ini mengejawantah, misalnya, dalam aktivitas Bentara Budaya Solo. Bagi sebagian orang, kota tersebut – sebagaimana diutarakan oleh narasumber – dianggap belum "*sedynamis Jogja, seurban Jakarta, atau seglobal Gianyar*". Pendekatan Bentara Budaya yang berbeda untuk kota yang berbeda sekaligus menunjukkan bahwa upaya pelestarian budaya bukanlah sebuah strategi tunggal yang bisa diterapkan di setiap kota.

Tema 2: Keterlibatan Publik dan Peran Institusi

Bentara Budaya berfungsi sebagai ruang inklusif yang memungkinkan bertemuanya penggiat seni dan komunitas penikmat seni. Lembaga ini menghidupkan suatu ekosistem dimana di dalamnya seniman, masyarakat, dan elemen terkait lainnya bisa ikut berpartisipasi memelihara praktik-praktik budaya lewat akses, visibilitas, dan dialog. Menurut narasumber, Bentara Budaya "...menggunakan ruang kami sebagai titik pertemuan bagi kreator dan apresiator."

Bentara Budaya mendorong munculnya kesadaran publik akan warisan budaya lokal dan mendukung keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya. Keterlibatan publik adalah

hal mendasar untuk memastikan kesinambungan budaya lokal. Tanpa adanya pelibatan publik, praktik-praktik budaya lokal berisiko menghilang dari pandangan dan kehilangan relevansi dengan masyarakat lokal yang seharusnya menjadi tempat dia hidup dan bertumbuh. Salah satu contoh adalah pameran alat-alat pertukangan tradisional yang biasa digunakan oleh *blandong* atau penebang pohon. Dalam pameran yang digelar di bulan November 2024 tersebut pengunjung menyaksikan langsung perkakas yang tidak hanya digunakan untuk membabat hutan dan mendirikan rumah namun juga untuk membuat pondasi sosial dan budaya bagi bertumbuhnya sebuah komunitas di suatu wilayah baru (Luqman 2024). Menurut narasumber, acara seperti ini memungkinkan pengunjung, baik seniman, akademisi, maupun orang awam juga saling berinteraksi dan berbagi pandangan.



Gambar 1. Pameran alat-alat pertukangan tradisional di Bentara Budaya Yogyakarta November 2024
Sumber: koleksi Bentara Budaya

Penciptaan ruang dialog budaya yang mendorong kesadaran publik dan memungkinkan pertemuan antara seniman tradisional dan publik bukanlah semata praktik lokal di kota-kota dimana Bentara Budaya berada. Karena, fenomena tersebut adalah praktik global, seperti halnya upaya pelestarian budaya di Shichahai, Beijing. Liu et al. (2023) menemukan bahwa:

"A cultural space promotes the development of a fine-grained description of regional cultural heritage and aids in relationship discovery to enhance the value construction ability" (Liu et al., 2023, hal. 585)

Ruang budaya yang diciptakan di Shichahai membantu warga untuk lebih memahami keunikan tradisi dan sejarah budaya di wilayah itu lewat penyediaan informasi yang mendetail tentang budaya lokal. Selain itu, ruang budaya tersebut membantu orang menemukan benang merah antar berbagai aspek dalam budaya setempat, sehingga budaya lokal lebih mudah dipahami dan dihargai. Ruang tersebut juga memfasilitasi terjadinya dialog dan memungkinkan partisipasi komunitas dalam upaya pelestarian, bahkan pengembangan warisan budaya menjadi sumber penghidupan.

Moreno-Mendoza et al. (2019) yang melakukan penelitian atas persepsi pengunjung museum di Spanyol menekankan pentingnya kolaborasi dan interaksi untuk menghidupkan peran ekonomi suatu museum dalam masyarakat. Untuk mempertahankan suatu museum, menjaga agar museum tetap hidup, dan menciptakan sinergi pengembangan sosial-ekonomi di masyarakat sekitarnya, perlu ada diciptakan suatu ruang. Dalam hal ini, ruang yang dimaksud bisa berupa ruang fisik atau kesempatan untuk beropini, bertemu dan berinteraksi antar pengunjung dan penikmat seni dan budaya. Rosley et al. (2024) yang menyelidiki pelibatan publik dalam penilaian akan estetika visual suatu situs bersejarah di Melaka Malaysia berargumen bahwa publik perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam menilai estetika visual suatu situs bersejarah karena persepsi masyarakat dianggap unik dibandingkan dengan penilaian para ahli. Masyarakat cenderung lebih sensitif dan waspada terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Hal ini terjadi karena adanya keterikatan emosional seperti keterikatan pada tempat, rasa memiliki, dan rasa akrab yang menghubungkan masyarakat dengan tempat mereka tinggal. Sehingga, tegas Rosley et al., keterlibatan masyarakat menjadi semakin penting karena mereka memiliki keterikatan emosional dan pemahaman langsung tentang kondisi sekitar mereka, yang seringkali tidak dimiliki oleh para ahli yang lebih banyak berfokus pada teori. Ugong (2024) juga mengamati bahwa masyarakat lokal memainkan peran sangat penting dalam mengawasi kegiatan pariwisata alam-budaya di Sarawak. Mereka tidak hanya melindungi situs tersebut, tetapi juga berinteraksi dengan pengunjung, menyediakan akomodasi, layanan makanan, dan fasilitas lain untuk pengunjung. Masyarakat juga menjadi relawan dalam tim ekspedisi penelitian dan berpartisipasi dalam proses pengembangan kawasan wisata. Keterlibatan masyarakat yang beragam dan didukung kebijakan dengan visi yang jelas akan menciptakan proses yang bebas konflik dan mendukung pelestarian situs arkeologi sebagai warisan budaya.

Penyediaan ruang inklusif yang mendukung pelestarian seni tradisi yang sering kali terpinggirkan dalam arus modernisasi sejalan dengan gagasan Alivizatou mengenai "*people-centered museology*" bahwa museum tidak boleh hanya menjadi ruang penyimpanan artefak, tetapi juga tempat di mana komunitas dapat terlibat aktif dalam menjaga tradisi dan budaya mereka. Di sisi lain, perlu ada kesadaran bahwa kebudayaan bersifat hidup dan dinamis, yang berarti selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan masyarakat. Alivizatou (2016, hal. 16) mengusulkan agar pelestarian budaya tidak hanya berfokus pada upaya penyelamatan apa yang telah luruh atau hilang, namun perlu melihat juga bahwa transformasi budaya itu sendiri adalah bagian dari nilai warisan: "*to think beyond concepts of decay, salvage, and loss and engage with cultural change as a new heritage value.*" Maka, museum dan lembaga budaya perlu menjadi ruang pertumbuhan dan adaptasi budaya pada perubahan sosial dan pergeseran nilai-nilai.

Lebih lanjut Alivizatou berpendapat bahwa museum dan lembaga budaya tidak hanya bisa memberikan pengetahuan searah, namun juga dapat berfungsi sebagai ruang dialog. Dalam dialog, warisan budaya dapat bertemu dengan modernitas. Hal ini memungkinkan budaya tradisional tetap relevan dalam konteks global yang terus berkembang dalam sebuah museum atau lembaga budaya yang menyediakan ruang untuk "*dialogue rather than on a one-dimensional dissemination of knowledge.*" (hal. 190) Bentara Budaya memberikan akses kepada seniman lokal untuk menunjukkan karya mereka kepada publik, menciptakan ruang di mana tradisi lokal dapat terus hidup melalui interaksi dengan masyarakat. Narasumber

meyakini bahwa pelestarian budaya tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif dari komunitas yang menjadi pemilik tradisi tersebut. Dalam pandangan narasumber, ketiadaan ruang dialog akan berdampak “seniman dan pengrajin ibarat asyik berkarya di langit”. Pelaku seni berada jauh, berjarak, dan dalam ruang hampa dengan ketiadaan koneksi antara penikmat seni dan karya-karya seniman dan pengrajin. mereka. Narasumber percaya bahwa sebuah ruang dialog akan menjadi lahan penyemaian benih keterlibatan publik, terutama dalam pelestarian budaya.

Tema 3: Pariwisata Budaya yang Berkelanjutan

Narasumber dalam wawancara juga menunjukkan dua sisi pariwisata: kegiatan pariwisata bisa mendukung, atau malah menggerus warisan budaya, tergantung nilai yang diusung serta implementasinya. Pariwisata massal, yang berfokus pada keuntungan ekonomi semata, seringkali mendegradasi makna suatu budaya. Sementara, pariwisata yang berbasis nilai budaya, cenderung mendukung pemahaman yang lebih baik dan rasa hormat akan suatu budaya, dan mendukung penciptaan kerja. Menurut narasumber: “*Tidak selalu pariwisata itu berdampak buruk... jika dikelola secara value, bukan mengejar mass-tourism.*”

Lebih lanjut, narasumber melihat adanya keterkaitan yang erat antara pertimbangan ekologis, termasuk bagaimana air dan tanah digunakan, dan praktik pariwisata yang bertanggung-jawab. Narasumber meyakini bahwa lingkungan hidup yang lestari berkelanjutan adalah komponen penting dalam strategi pelestarian warisan budaya.

Narasumber mencontohkan praktik pariwisata di Bali pada era 1930-an dimana Bali dicitrakan sebagai museum yang hidup (*living-museum*). Model ini menarik perhatian segmen wisatawan yang punya basis edukasi, misalkan seniman, antropolog, peneliti, pembuat film. Sehingga, wisatawan memperlakukan Bali sebagai kawasan bernalih.

Namun, lanjut narasumber, lanskap pariwisata berubah menjadi industri sejak tahun 1970-an. Perubahan model pariwisata mulai bergeser, dan hampir seluruh kalangan hanya mengejar dampak ekonomi dari *mass-tourism*. Hal tersebut bukan hanya tantangan lokal Indonesia, namun sudah menjadi tantangan global pelestarian budaya di wilayah wisata. Dalam kasus pengelolaan warisan budaya bawah tanah di Iran, misalnya, Mousazadeh et al. (2023) menyatakan bahwa peningkatan jumlah pengunjung serta polusi transportasi memberikan dampak negatif terhadap kawasan wisata. Salah satu solusi, menurut Mousazadeh et al. adalah mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi dan mendukung bisnis lokal yang menyediakan layanan ini. Masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam pengembangan solusi yang berkelanjutan. Dengan cara ini, kebutuhan pengunjung dan warga setempat dapat terpenuhi, serta manfaat dari layanan transportasi rendah emisi yang berkelanjutan dapat dinikmati oleh semua pihak. Mousazadeh et al. meyakini bahwa model pariwisata sebaiknya ditujukan untuk mempererat rasa kebersamaan dan jalinan sosial masyarakat serta dirancang agar bisa mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, serta memaksimalkan manfaat positif bagi masyarakat tersebut dan perekonomian.

Narasumber juga menekankan pentingnya ide keadilan dalam penerapan model pariwisata dimana masyarakat setempat ikut menjadi penentu keputusan dan bukan hanya menjadi penonton di pinggiran. Lebih jauh narasumber meyakini bahwa aspek keseimbangan

ekologis suatu kawasan perlu untuk diperhatikan. Alihfungsi lahan, misalkan, berpotensi menyumbat ketersediaan air demi pemenuhan kebutuhan fasilitas pariwisata. Hal ini segaris dengan keyakinan Guri et al. (2020) bahwa kekayaan alam dan budaya lokal bisa dimanfaatkan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di daerah pedesaan tanpa perlu merusak lingkungan atau menghilangkan nilai-nilai budaya asli. Menurut Guri et al., agar pariwisata yang berbasis lingkungan dan budaya bisa bertahan dalam jangka panjang, masyarakat setempat harus ikut serta dalam setiap tahap pengembangan dan proses pengelolaannya. Pentingnya keterlibatan masyarakat juga merupakan sesuatu yang diyakini oleh Ugong (2024) yang meneliti situs arkeologi yang terdapat di Sarawak, Malaysia. Menurut Ugong, pelibatan masyarakat yang tinggal di dekat situs arkeologi adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga dan melindungi situs tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu mengatasi masalah seperti vandalisme, hilangnya artefak, dan bahkan memantau aktivitas wisata yang terjadi di sekitar situs tersebut. Dampak positif lain menurut Ugong adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mendukung situs arkeologi di Sarawak menarik perhatian sponsor dan donatur sehingga tercipta lingkungan yang mendukung pelestarian situs-situs bersejarah tersebut. Pendekatan ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi di kota-kota Indonesia dimana Bentara Budaya berada, di mana urbanisasi dan perubahan gaya hidup dapat mengubah persepsi masyarakat tentang nilai budaya. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber, "*perubahan itu datangnya bisa dari mana saja, misalnya dari percepatan teknologi dan arus mobilitas warganya.*"

Tema 4: Komitmen Kebijakan dan Politik

Narasumber menegaskan bahwa keberhasilan pelestarian budaya tidak lepas dari dukungan kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai budaya lokal. Kemauan politik dari para pemangku kepentingan menjadi faktor penentu, terutama dalam menciptakan regulasi yang mendukung dan yang berpijak pada kesadaran akan sejarah dan budaya. Menurut narasumber, suatu kebijakan hendaknya "...tidak melupakan akar sosial-budaya yang ada di kota masing-masing."

Untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan sekaligus menjaga pelestarian budaya di berbagai wilayah perkotaan, dibutuhkan pendekatan yang seimbang antara pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, serta kesadaran akan tantangan yang dibawa oleh modernisasi. Kesadaran ini, menurut narasumber, harus diwujudkan dalam bentuk *political will* yang berkeadilan dari para pemangku kebijakan, di mana *political will* ini perlu diekplorasi lebih dalam dengan melibatkan multiperspektif.

Untuk menjaga agar warisan budaya tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat, narasumber menyatakan bahwa Bentara Budaya Yogyakarta sejak tahun 1982 memberikan ruang bagi seni tradisi dan seni pinggiran, yang sebelumnya terabaikan. Narasumber meyakini bahwa keterlibatan publik sangat penting untuk membentuk kesadaran bersama mengenai nilai budaya dan seni. Sebuah ruang fisik sebagai wahana pertemuan antara seniman dan penikmat seni adalah penting untuk memperkuat kesadaran publik.

Kebijakan menjadi faktor penting yang dalam pelestarian budaya. Dei (2024) yang meneliti praktik pengelolaan pengetahuan adat di Ghana mengamati bahwa ketiadaan

kebijakan mengenai cara mengumpulkan dan merawat pengetahuan yang berasal dari budaya atau tradisi lokal bisa berakibat pada ketidakpastian jenis pengetahuan apa saja yang harus dikumpulkan dan dilestarikan. Tanpa kebijakan yang jelas, pengetahuan ini mungkin akan hilang atau tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya. Di Indonesia, sebaliknya, narasumber menyatakan bahwa sudah terdapat kerangka hukum yang jelas seperti UU Pemajuan Kebudayaan, yang memberikan porsi peran kepada berbagai pihak dalam pelestarian budaya.

Selain kerangka kebijakan yang kuat, keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya adalah elemen penting yang tidak hanya mendukung keberlanjutan budaya tetapi juga memperkuat hubungan antara komunitas, seni, dan nilai-nilai budaya. Pendekatan yang dilakukan oleh Bentara Budaya melalui keterlibatan publik sejalan dengan prinsip-prinsip pelestarian budaya yang berkelanjutan seperti yang ditemukan dalam berbagai studi terdahulu. Pelibatan publik dalam pelestarian warisan budaya memungkinkan komunitas untuk menjadi penjaga warisan tersebut, memastikan bahwa nilai-nilai budaya – di tengah gempuran arus globalisasi dan komersialisasi – dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Pendekatan ini relevan dengan pandangan Tsing et al. (2024) tentang pentingnya memperhatikan "*patches*" atau area spesifik dalam mengkaji dampak lingkungan dan sosial dari intervensi manusia. Mereka menulis: "*learning to observe and describe the patchy Anthropocene allows us to notice processes, protagonists, and connections that could show us how to stop Anthropocene proliferations.*" Tsing et al. menekankan pentingnya keterampilan observasi dan deskripsi terhadap kondisi "*patch*" agar ini, kita dapat mengenali berbagai elemen dan interaksi yang ada dalam ekosistem – dalam hal ini ruang dimana budaya lokal semestinya hidup – yang rusak, yang dapat memberikan wawasan dan petunjuk mengenai strategi untuk menghentikan atau mengurangi penyebaran masalah yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.

Upaya Bentara Budaya memberikan akses kepada publik dan seniman lokal untuk menjaga tradisi yang sering kali terlupakan dalam arus globalisasi dan urbanisasi bisa dianggap sebagai upaya mempertahankan "*patch*" budaya lokal di tengah arus modernisasi global.

Kesimpulan

Pelestarian warisan budaya dalam konteks perkembangan kota modern harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan modernisasi dan pelestarian nilai-nilai budaya yang mendalam. Penelitian dan contoh kasus dari Singapura, China, dan Taiwan menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak hanya tentang menjaga bentuk fisik, tetapi juga tentang menjaga hubungan antara budaya, lingkungan, dan masyarakat. Upaya Bentara Budaya memberikan ruang dimana pembuat seni dan publik bisa bertemu serta mendorong kesadaran dan keterlibatan publik, adalah contoh konkret tentang bagaimana pelestarian budaya dapat disesuaikan dengan konteks kota modern, tanpa mengorbankan makna dan identitas budaya.

Pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata dapat berjalan seiring, meskipun menghadapi tantangan besar terkait keseimbangan antara pelestarian dan modernisasi.

Keterlibatan masyarakat lokal dan interpretasi yang tepat dari warisan budaya adalah elemen kunci untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya dapat terus dilestarikan, bahkan ketika destinasi wisata berkembang untuk memenuhi tuntutan pasar global. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, pariwisata budaya dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pelestarian warisan budaya sambil memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Baik dalam konteks lingkungan maupun budaya, Antroposen menjadi era yang menciptakan tantangan yang harus dihadapi, dan menjadi pengingat akan pentingnya keterlibatan masyarakat dan perhatian terhadap dinamika lokal. Intervensi manusia, baik melalui infrastruktur maupun modernisasi sosial, memiliki konsekuensi yang dampaknya sering kali tidak terduga. Namun, dengan memperhatikan interaksi spesifik di tingkat lokal dan melibatkan masyarakat secara aktif, upaya pelestarian dapat berjalan lebih efektif, baik dalam konteks pelestarian lingkungan maupun budaya.

Daftar Pustaka

- Alivizatou, M. (2016). *Intangible Heritage and the Museum: New Perspectives on Cultural Preservation*. Routledge.
- Alvarez, M. D., Yuksel, A., & Go, F. (2016). *Heritage Tourism Destinations: Preservation, Communication and Development*. CABI.
- Bailey, G., Defilippis, F., Korjenic, A., & Čaušević, A. (2020). *Cities and Cultural Landscapes: Recognition, Celebration, Preservation and Experience*. Cambridge Scholars Publishing.
- Byrne, D. (2008). A critique of unfeeling heritage. In *Intangible heritage* (pp. 243-266). Routledge.
- Dei, D. J. (2024). Sustainability and development of EWE communities in Ghana through indigenous knowledge management practices. *Collection and Curation*.
<https://doi.org/10.1108/cc-11-2023-0035>
- Guri, E. A., Osumanu, I. K., & Bonye, S. Z. (2020). Eco-cultural tourism development in Ghana: potentials and expected benefits in the Lawra Municipality. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 19(4), 458–476. <https://doi.org/10.1080/14766825.2020.1737095>
- Liu, X., Pan, Y., & Han, Y. (2023). Constructing cultural space and telling cultural stories: a case study of regional cultural heritage preservation in Shichahai, Beijing. *Aslib Journal of Information Management*, 76(4), 585–612. <https://doi.org/10.1108/ajim-05-2022-0256>
- Luqman, K. (2024, November 19). Mengenang sejarah pertukangan, Bentara Budaya Yogyakarta gelar pameran BLANDONG. *Kompas.tv*.
<https://www.kompas.tv/entertainment/554214/mengenang-sejarah-pertukangan-bentara-budaya-yogyakarta-gelar-pameran-blandong>
- Mahira, E. D., Soemardiono, B., & Santoso, E. B. (2023). Cultural Tradition as a Local Context for Sustainable of Urban Identity in Gianyar City case study. *Pertanika Journal of Social Science & Humanities*, 31(1), 283–301. <https://doi.org/10.47836/pjssh.31.1.15>
- Moreno-Mendoza, H., Santana-Talavera, A., & Boza-Chirino, J. (2019). Perception of governance, value and satisfaction in museums from the point of view of visitors. Preservation-use and management model. *Journal of Cultural Heritage*, 41, 178–187. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2019.06.007>
- Mousazadeh, H., Ghorbani, A., Azadi, H., Almani, F. A., Zangiabadi, A., Zhu, K., & Dávid, L. D. (2023). Developing Sustainable Behaviors for Underground Heritage Tourism

- Management: The Case of Persian Qanats, a UNESCO World Heritage Property. *Land*, 12(4), 808. <https://doi.org/10.3390/land12040808>
- Ocón, D. (2021b). Balancing sustainable development and cultural heritage preservation: luxury burial legacies in Singapore. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 13(1), 87–107. <https://doi.org/10.1108/jchmsd-08-2020-0116>
- Prompayuk, S., & Chairattananon, P. (2016). Preservation of Cultural Heritage Community: Cases of Thailand and Developed Countries. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 234, 239–243. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.239>
- Rietjens, S. (2019b). Explaining the Cultures of Intelligence. *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 32(1), 202–207. <https://doi.org/10.1080/08850607.2018.1524250>
- Rosley, M. S. F., Harun, N. Z., Yusof, J. N., & Rahman, S. R. A. (2024). Empowering public participation in assessing the indicators of aesthetic value for historical landscape: a case study on Melaka, Malaysia. *Cogent Arts and Humanities*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2380114>
- Shehata, A. M. (2022). Current trends in urban heritage conservation: medieval historic Arab city centers. *Sustainability*, 14(2), 607. <https://doi.org/10.3390/su14020607>
- Sun, M. (2009b). Formation of Cultural Competitive Force When Doing Business in China. *Asian Social Science*, 4(5). <https://doi.org/10.5539/ass.v4n5p37>
- Tsing, A. L., Deger, J., Saxena, A. K., & Zhou, F. (2024). *Field Guide to the Patchy Anthropocene: The New Nature*. Stanford University Press.
- Ugong, N. A. (2024). Sustainable cultural heritage management: a case study in Sarawak, Malaysia. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.1108/jchmsd-04-2023-0036>
- Udeaja, C., Trillo, C., Awuah, K. G., Makore, B. C., Patel, D. A., Mansuri, L. E., & Jha, K. N. (2020). Urban Heritage Conservation and Rapid Urbanization: Insights from Surat, India. *Sustainability*, 12(6), 2172. <https://doi.org/10.3390/su12062172>
- UNESCO. (2018). *Basic Texts of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.